

08



**PERTANIAN BUKAN PELENGKAP  
PEMBANGUNAN**

Dr. Ir. Anton Apriyantono, M.S.

## Menimbang Realitas Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar bangsa ini, suatu cita-cita luhur yang ingin diraih tepat saat Indonesia merayakan seratus tahun kemerdekaannya. Pertanyaannya, apakah cita-cita itu berlebihan untuk diwujudkan? Mengingat negara kita masih jauh dari istilah kata 'maju'. Jika dijabarkan lebih jauh, impian tersebut tidak hanya berwujud pembangunan jalan yang mulus, tingginya gedung-gedung pencakar langit, dan lajunya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Namun, Indonesia Emas harus mencakup hal-hal paling mendasar dan krusial bagi rakyat, seperti: pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas kemampuan dan keterampilan generasi penerus bangsa. Apabila keduanya berjalan sejalan, maka istilah 'maju' dan 'emas' yang kita harapkan, tidaklah mustahil untuk terwujud.

Apalah artinya disebut sebagai negara maju jika rakyatnya masih berada di ambang kemiskinan? Itu bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Sebelum merancang Indonesia Emas 2045, harus dilakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi. Di Malaysia, harga BBM RON 95 hanya sekitar Rp7.000, sementara di Indonesia sudah mencapai Rp11.000. Perbedaan ini bukan semata karena subsidi, tetapi karena tata kelola mereka lebih baik. Di Indonesia, kebocoran anggaran, utang yang menumpuk, dan kasus korupsi masih mencapai ratusan triliun yang justru menambah beban rakyat. Maka, pembenahan pertama yang paling mendasar menuju Indonesia Emas 2045 adalah memastikan Indonesia benar-benar bebas dari korupsi.

Tanpa pemerintahan yang bersih, akan sulit mewujudkan harga pangan yang terjangkau, biaya pendidikan yang murah, atau pelayanan kesehatan yang merata. Selama uang milik rakyat masih banyak mengalir ke kantong pribadi, maka mustahil kemakmuran bersama dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional, bukan hanya sekadar jargon politik lima tahunan.

Marilah kita kupas satu per satu langkah penting yang harus kita usahakan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan mimpi itu. Namun, modal saja tidaklah cukup tanpa adanya kemampuan (*skill*) yang harus dimiliki oleh rakyatnya sebagai pihak yang mengelola. Beberapa hal yang harus dipersiapkan Indonesia untuk menyongsong cita-cita itu adalah dengan penguatan di bidang pangan, pertanian, maupun pengelolaan sumber daya alam secara keseluruhan.

Sebelum membahas lebih jauh tentang langkah-langkah menuju masa depan yang cemerlang atau soal apa saja yang akan kita dapatkan di masa depan, perlunya kita kembali berpegang pada cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu UUD 1945 (yang belum diamandemen) dan Pancasila. Para pendiri bangsa menyampaikan petuah mereka dengan jelas, bahwa demokrasi harus berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan

rakyat, bukan *one man one vote*. Prinsip inilah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam mengelola negara.

Dua puluh tahun menjelang 2045, bukanlah waktu yang panjang untuk melakukan perubahan dan pembenahan. Oleh karena itu, sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, baik pemerintah dan rakyatnya harus memiliki visi yang sama kuatnya. Seperti yang tertuang dalam Pancasila, khususnya sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Indonesia harus mulai menyatukan langkah: pemerintah yang dapat dipercaya oleh rakyat dan rakyat yang mau belajar mempercayai pemerintah. Dengan kesadaran dari kedua belah pihak, Indonesia akan memiliki setidaknya beberapa persen kemungkinan untuk menuju Indonesia Maju.

**Pertama, pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.** Indonesia dikenal sebagai negara yang subur, apa pun yang kita tanam, akan tumbuh menjadi pangan dan hasil bumi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, buminya menyimpan hasil yang berlimpah. Namun kenyataan di lapangan sering kali berbanding terbalik dengan kenyataan, di mana hasil dan kekayaan alam hanya dinikmati segelintir orang atau si pemangku kepentingan, sementara mayoritas rakyat—yang katanya berhak—justru belum merasakan manfaatnya. Hal itu tersebut jelas sangat bertentangan tentang penegasan pemerintah bahwa sumber daya alam Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana?

Gambaran nyata yang dapat kita lihat ketika rakyat yang mendiami suatu wilayah subur, hanya dijadikan sebagai penonton saat tanahnya ditanami pihak luar, tanpa dilibatkan. Lebih parahnya lagi, sumber daya alam tersebut hanya dikuasai segelintir elite yang mendapatkan keringanan pajak. Akibatnya, penerimaan kas negara menjadi berkurang dan rakyat tidak memiliki pendapatan. Lantas, bagaimana rakyat Indonesia akan naik ekonominya, jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dari tanahnya?

Apakah itu yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sedangkan jumlah kekayaan lima konglomerat setara dengan seratus juta rakyat lainnya. Jutaan hektar lahan sawit, tambang, dan lahan lainnya hanya dikuasai oleh segelintir orang, sementara mayoritas petani kita hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Jika terus begitu, makna ‘keadilan’ hanya akan menjadi semboyan.

Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun, tetapi investasi harus berjalan seimbang. Pola lama yang lebih adil, seperti kemitraan antara perusahaan inti dan plasma bagi petani perlu dihidupkan kembali. Selama ini, pembagian hasil hanya memberikan porsi 20 persen untuk petani dan 80 persen bagi pemerintah. Mengapa skema ini tidak diubah dan disetarakan saja, misalnya pembagiannya 50:50? Jika hal ini dilakukan, petani akan lebih berdaya, merasa dihargai, dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah memang harus melakukan upaya serius untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Salah satunya dengan menatap kembali penguasaan lahan, aset, tambang, dan sumber daya alam. Karena sudah menjadi suatu keharusan bahwasanya negara harus membawa tanah, pangan, dan sumber daya alam agar kembali pada rakyat. Bukan berarti perusahaan besar tidak boleh mengelola, tetapi harus ada mekanisme agar hasilnya juga dapat dirasakan oleh rakyat kecil.

Tentu saja pemerintah tidak harus memberikan bantuan atau hasilnya berupa uang secara cuma-cuma, tetapi dalam bentuk lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari penyediaan akses lahan yang lebih adil bagi petani, pemberian bibit unggul dengan harga terjangkau, hingga berkontribusi untuk melakukan pendampingan dalam penggunaan teknologi modern agar hasil panen mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat akses pasar, sehingga produk pangan lokal memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan petani tidak selalu dirugikan oleh permainan harga tengkulak.

Tidak hanya itu, bentuk dukungan lain diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan yang memadai, seperti irigasi, jalan produksi, dan gudang penyimpanan hasil panen. Dengan fasilitas yang baik, distribusi pangan menjadi lebih lancar dan kerugian akibat keterlambatan atau pembusukan dapat ditekan semaksimal mungkin. Lama-kelamaan, Indonesia akan terbebas dari impor bahan pokok, karena hasil panen dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar. Tak kalah penting, negara harus memastikan regulasi yang melindungi para petani lokal dari praktik monopoli maupun penguasaan lahan oleh segelintir pihak.

Dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep zakat dengan porsi besar, sekitar 20 persen, yang digunakan untuk memakmurkan fakir miskin. Prinsip ini menegaskan bahwasanya kemiskinan tidak bisa di atasi hanya dengan memberikan 'ikan' secara terus-menerus, melainkan dengan menyediakan 'kail' dan kesempatan untuk memancing. Dengan cara ini, rakyat bukan hanya menjadi penerima bantuan pasif, melainkan benar-benar diberikan kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Bantuan yang diberikan negara bukanlah "ikan", melainkan "kail" yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Akhirnya, kedaulatan pangan dan keadilan sosial akan lebih mudah diwujudkan, sehingga mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekadar slogan, tetapi realitas yang hidup dalam keseharian masyarakat.

**Kedua, peningkatan terhadap kualitas kemampuan dan keterampilan generasi penerus bangsa.** Bagian ini juga tak kalah penting, karena Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan kekayaan alam semata. Kekayaan alam dan hasil bumi yang dikelola dengan tidak baik, perlahan-lahan akan habis, sedangkan alam membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara maksimal.

Pendidikan akan menjadi kunci utama, bukan hanya sebatas menuntaskan kewajiban bersekolah, tetapi diharapkan kualitasnya. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, bukan hanya mengajarkan hafalan, melainkan perlunya mengasah daya kritis, kreativitas, serta keterampilan teknis yang relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Selain pendidikan formal, pelatihan vokasi dan kejuruan juga perlu diperkuat, agar generasi muda tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja baru. Keterampilan digital, penguasaan bahasa asing, pemahaman tentang keuangan, dan kemampuan kepemimpinan (*leadership*) harus ditanamkan sejak dini. Dengan begitu, generasi penerus tidak tertinggal di tengah arus globalisasi dan revolusi industri yang terus melaju.

Perlu digarisbawahi bahwa pendidikan dan keterampilan saja tidak cukup tanpa pembentukan karakter. Generasi muda harus ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, budi pekerja, dan kepekaan sosial agar mereka menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi bijak dalam bertindak. Karakter inilah yang akan membedakan Indonesia dengan bangsa lain: *generasi yang mampu bersaing di tingkat global, tetapi berpijak pada jati diri bangsa.*

Sebenarnya, kualitas SDM Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain, hanya saja dukungan sistem yang sering kali sangat minim. Cina bisa menjadi contoh nyata. Pada dekade 1980-an, pemerintah mereka sengaja mengirim ribuan mahasiswa ke luar negeri dengan beasiswa, meskipun hidup dengan sederhana. Para mahasiswa tersebut pun diarahkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan diharapkan kembali untuk membangun bangsanya. Kini, hasil strategi tersebut terlihat secara nyata, Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Ini juga merupakan bukti adanya kolaborasi antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga Cina bisa semaju sekarang.

Untuk di Indonesia sendiri, ini masih menjadi PR bersama. Masalah beasiswa dan mengirim mahasiswa ke luar negeri, kita pun tidak kalah dengan negara lain. Namun, pada akhirnya saat ilmuwan itu kembali ke Indonesia, mereka harus dihadapkan pada kenyataan dan kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki dukungan yang memadai: gaji kecil, fasilitas riset terbatas, dan birokrasi yang berbelit. Padahal, Indonesia memiliki momentum besar pada era B. J. Habibie. Beliau membangun industri kedirgantaraan dengan visi jauh ke depan, karena sadar bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang butuh pesawat untuk transportasi antarpulau. B. J. Habibie bahkan mengirim banyak anak bangsa untuk belajar ke luar negeri agar menjadi ahli di bidangnya. Sayangnya,

industri tersebut kemudian dihentikan dan potensi emas bangsa dibiarkan tersedot keluar negeri.

Inilah yang membedakan strategi Cina dengan negara kita. Cina mengirim keluar untuk kembali dimanfaatkan, sedangkan Indonesia justru melepaskan SDM terbaiknya tanpa arah yang jelas. Kita tidak kekurangan orang pintar, karena banyak sekali orang Indonesia yang berdaya di perusahaan besar di luar negeri dengan memegang posisi penting. Kita hanya kalah dalam membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menuju ke sana. Jika pola ini tidak dibenahi, maka target Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi retorika semata.

Jika generasi muda berhasil diberdayakan, maka mereka akan menjadi penggerak ekonomi, inovasi, dan pembangunan yang tak terkalahkan. Namun, jika dibiarkan tanpa arah, bonus demografi tersebut hanya akan menghasilkan kelompok pengangguran massal, kesenjangan sosial, dan masalah baru bagi bangsa ini. Oleh karena itu, keseimbangan SDA dan SDM sangat penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

PR kita masih sangat banyak, sedangkan tinggal dua dekade lagi menuju 2045. Apakah target itu masih mungkin untuk dicapai? Jawabannya, mungkin, tetapi dengan syarat. Syaratnya, negara ini harus benar-benar dibersihkan dari kepentingan sempit, tata kelola harus transparan, dan SDM unggul diberdayakan secara serius. Fokusnya pun hanya satu: *bagaimana memajukan rakyat dan bangsa*. Jika itu bisa dilakukan, maka Indonesia Emas bukanlah sekadar impian, melainkan kenyataan yang hidup dalam sejarah bangsa.

## **Pertanian dalam Cermin Indonesia Emas**

Indonesia dikenal sebagai negeri agraris yang subur dan kaya hasil bumi. Apa pun yang ditanam, hampir selalu tumbuh dan menghasilkan. Namun, fakta ini sering kali hanya menjadi sebuah semboyan tanpa diiringi keseriusan dalam pengelolannya. Jika Indonesia bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-citanya untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka sektor pertanian harus ditempatkan sebagai salah satu fondasi utamanya. Tanpa kedaulatan pangan, tidak akan mungkin tercipta kedaulatan bangsa.

Sejarah mencatat, banyak bangsa besar yang runtuh karena krisis pangan ekstrem. Pangan bukan hanya soal perut kenyang, tetapi soal martabat dan kemandirian suatu bangsa. Negara yang masih bergantung pada impor beras, gandum, kedelai, atau daging, tidak pernah benar-benar merdeka. Bagaimana mungkin menyebut diri 'maju', jika kebutuhan pokok sehari-hari rakyat masih harus menunggu kiriman kapal dari negara lain.

Di tengah krisis global, perubahan iklim, maupun konflik geopolitik, pangan semakin menjadi senjata politik (McMichael, 2013). Itulah alasan mengapa pertanian harus ditempatkan sebagai sektor strategis, bukan

hanya sekadar pelengkap dalam perencanaan pembangunan. Negara-negara maju melindungi sektor pertaniannya dengan subsidi besar-besaran, sementara Indonesia justru sering membiarkan petani berjuang sendiri untuk menghadapi harga pupuk yang mahal, akses pasar yang terbatas, dan permainan dari tengkulak nakal.

Pertanian yang kuat akan menjadi tameng bagi Indonesia dari gejolak krisis global. Salah satu contohnya adalah saat pandemi Covid-19 melanda di hampir seluruh dunia, menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasokan dunia. Dari kasus pandemi ini, hanya negara yang mampu memenuhi pangannya sendiri, akan jauh lebih tangguh menghadapi krisis, karena tidak bergantung dengan negara lain. Sepenting itu pertanian untuk mengamankan pasokan pangan di saat-saat genting. Oleh karena itu, investasi terbesar Indonesia seharusnya bukan hanya pada infrastruktur beton saja, tetapi pada 'infrastruktur hijau'—tanah subur, air irigasi yang lancar, benih unggul, teknologi pertanian yang memadai, dan kesejahteraan petani—sesuai dengan visi Indonesia Emas yang sempat kita bahas sebelumnya.

Jika berbicara soal strategi menuju Indonesia Emas 2045, bidang pertanian memegang peran yang sangat penting. Indonesia sesungguhnya punya peluang besar menjadi negara maju, bukan hanya karena kesuburan tanah dan kekayaan hayatinya. Bahkan, sejak zaman penjajahan, Indonesia sudah dikenal sebagai negara penghasil rempah yang diburu dunia. Cengkih, pala, lada, dan kayu manis dari Indonesia pernah menjadi komoditas yang mengubah peta perdagangan global. Maka tidak heran jika Jepang dan Belanda datang untuk menjajah Indonesia, karena kekayaan alamnya yang melimpah. Potensi untuk menguasai pasar global masih terbuka lebar, hanya saja sering kali dikelola dengan baik, sehingga nilai tambahnya banyak dinikmati bangsa lain.

Hilirisasi pertanian juga dapat dijadikan penggerak sistem utama perekonomian Indonesia. Hilirisasi yang dimaksud, bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi berkualitas terbaik di dunia. Namun, yang mendunia justru merek-merek asing dengan nama cappuccino, espresso, dan olahan produk modern lainnya. Sedangkan Indonesia masih bertahan pada ekspor biji kopi mentah. Bayangkan jika biji kopi tidak hanya diekspor dalam bentuk biji mentah, melainkan hadir di pasar dunia dengan menggunakan nama *brand* khusus dari Indonesia, pastilah nama Indonesia akan dikenal dan naik di pasar dunia, lengkap juga dengan cerita budaya dan identitas lokal yang melekat.

Begitu pula dengan cokelat, rempah-rempah, atau produk hortikultura lainnya. Semua itu akan menjadi wajah baru ekonomi Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada tambang dan migas, melainkan pada pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Ketika beberapa orang ditanya tentang cokelat terbaik, mereka akan segera menjawab dari Belgia atau Swiss. Padahal, kedua negara itu tidak menanam kakao. Mirisnya, bahan bakunya

berasal dari Indonesia. Akibat kita tidak mengolahnya secara maksimal, nilai tambahnya justru dinikmati orang lain.

Hal serupa terjadi pada kelapa, sawit, nilam (*patchouli*), hingga getah pinus. Indonesia adalah produsen besar minyak nilam, tetapi parfum justru diproduksi di luar negeri dan dijual kembali kepada kita dengan harga yang berkali-kali lipat. Getah pinus yang kita ekspor hanya menghasilkan turunan awal seperti terpentin, sementara India mengolahnya lebih jauh dan menghasilkan aroma kimia untuk industri parfum dan *flavor*. Lagi-lagi, bahan baku dari kita, tetapi keuntungan besar dinikmati negara lain.

Oleh sebab itu, proses hilirisasi ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Mulai dari petani, pengusaha kecil, hingga industri besar. Semuanya akan terlibat dalam rantai pasok yang sehat. Selain itu, kita dapat menikmati nilai tambah dari produk-produk mentah yang sudah diolah.

Di sinilah kontribusi ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Riset harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka jalan bagi hilirisasi. Dari menghasilkan bibit unggul padi, kopi, dan kakao, hingga mengembangkan teknologi pengolahan parfum, *flavor*, serta produk pangan bernilai tinggi. Saya sendiri pernah merasakan inovasi sederhana bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah paten bumbu mi instan yang telah saya kembangkan. Selama ini, bumbu mi instan dipisahkan dalam dua kemasan: bubuk dan minyak. Melalui riset, saya dapat menggabungkan keduanya dalam satu kemasan, sehingga lebih praktis digunakan. Inovasi ini tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat signifikan mengurangi penggunaan plastik, menekan biaya kemasan, serta membuat proses memasak lebih cepat.

Riset lain dilakukan pada asam jawa yang diekstrak dan kemudian dipakai dalam industri permen Tamarin, atau inovasi minuman yang berbahan madu yang berhasil dipasarkan. Meskipun sederhana, semua ini menunjukkan satu hal: satu riset pangan bisa terhubung langsung dengan kebutuhan industri dan konsumen. Namun, saya menyadari bahwa inti dari pertanian ditentukan dari bibit unggul. Jika bibitnya unggul, produktivitasnya bisa meningkat secara signifikan. Apabila kita masih terus bergantung pada bibit impor atau tidak memiliki riset serius di bidang ini, sulit sekali membayangkan kemandirian pangan bisa terwujud di Indonesia.

Baik melalui riset kecil di laboratorium maupun kebijakan besar di kementerian, arah yang ditempuh tetap sama: membangun fondasi kuat bagi pertanian Indonesia. Dengan meningkatkan produktivitas melalui riset dan teknologi, keberanian melangkah ke hilirisasi, keberpihakan pada petani kecil, serta dukungan kebijakan yang konsisten lintas pemerintah, sektor pertanian dapat menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebenarnya, lahan pertanian kita tidak seluas itu apabila dihitung per kapita, hanya sepertiga rata-rata dunia. Artinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan luasan lahan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, berkualitas, dan berdaya saing. Dibutuhkan berbagai inovasi dan terobosan baru, khususnya yang mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, diperlukan campur tangan dari generasi muda untuk mengelola lahan dengan *style* baru versi mereka. Namun, kenyataannya, anak muda justru enggan terjun ke sektor ini, karena dianggap identik dengan kemiskinan, pekerjaan kasar, dan masa depan yang suram. Padahal *smart farming*, *agritech*, dan digitalisasi pasar hasil dari pertanian dapat membuka peluang baru bagi generasi muda untuk kembali menekuni bidang ini (FAO, 2019). Jika arah ini benar-benar ditempuh, maka sektor pertanian akan menjadi sektor yang modern, menguntungkan, dan berkelas.

Penerapan pertanian cerdas (*smart farming*) diharapkan dapat mempercepat proses pengelolaan lahan, pembibitan, proses perawatan, hingga memanen. Beberapa daerah telah menerapkan sistem ini, karena dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan campur tangan generasi muda yang melek teknologi, pertanian bukan suatu pekerjaan yang dianggap remeh, bahkan bernilai tinggi. Bertani di era digital sudah mulai meninggalkan proses konvensional, beralih pada peralatan modern, sehingga petani hanya fokus pengawasan.

Untuk menarik minat generasi muda di sektor pertanian membutuhkan strategi inovatif dan terpadu, bukan hanya sekadar ajakan. Beberapa video pendek yang disebarluaskan di sosial media juga penting sebagai *branding* bahwa pertanian masa kini tidaklah sama dengan pertanian beberapa tahun yang lalu, sehingga generasi muda memiliki pandangan baru tentang sektor pertanian. Beberapa program pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan mulai dijalankan dengan pemberian lahan dan peralatan pertanian modern untuk menggaet generasi muda (Tempo, 2024).

Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanian adalah salah satu jalan paling nyata untuk mewujudkan sila tersebut. Sebab, lebih dari separuh rakyat Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Jika sektor ini dimajukan, maka jutaan rakyat kecil terangkat kesejahteraannya. Sebaliknya, jika sektor ini dibiarkan stagnan, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar.

Indonesia Emas 2045 bukan sekadar deretan gedung tinggi atau jalan tol panjang, melainkan bangsa yang berdiri tegak di atas kemandirian. Sawah, ladang, dan kebun harus menjadi simbol dari kemajuan bangsa. Dengan menyejahterakan petani, memperkuat kedaulatan pangan, serta menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan, Indonesia bisa benar-benar membuktikan dirinya sebagai negara yang besar, mandiri, dan berdaulat.

## Pendidikan sebagai Akar Pertanian Mandiri

Untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang akan bersama-sama kita songsong dua puluh tahun yang akan datang, membangun generasi unggul merupakan fondasi utama dan pendidikan adalah salah satu jalan menuju ke sana. Pendidikan berkualitas, merata, dan berkeadilan. Ini bukan hanya terfokus pada akses sekolah yang layak, tetapi juga tentang ekosistem yang mendukung pertumbuhan karakter, etos kerja, dan keterampilan yang relevan pada saat ini.

Berbicara pendidikan, tidak melulu membahas soal fasilitas yang mewah. Saya percaya bahwa sekolah sederhana sekali pun, bisa melahirkan sumber daya manusia yang luar biasa. Kita ambil contoh, B. J. Habibie, seorang putra bangsa yang mendunia. Beliau tidak menempuh pendidikan dasar di sekolah yang mewah, tetapi dengan kerja keras, kecintaannya pada ilmu, dan bimbingan yang tepat, menjadikan beliau seorang ilmuwan kelas dunia. Namun, ini sudah tahun 2025, sangat jauh dari tahun di mana B. J. Habibie memulai pendidikan di bangku sekolah dasar. Sudah seharusnya ada kemajuan di sektor pendidikan, terutama di fasilitasnya. Mengapa? Fasilitas juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran.

Seharusnya, anak dari pelosok negeri sudah mendapatkan pendidikan yang layak. Minimal sekali, bangunan yang kokoh dan nyaman digunakan untuk belajar, bukan bangunan reyot, beratap bocor, dan tak berlantai. Jangankan kenyamanan, kelayakan pun tidak didapatkan. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar, jika mereka masih memiliki kekhawatiran dengan kondisi ruangan yang kapan saja bisa roboh? Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, sehingga kondisi tersebut sudah sepatasnya tidak terjadi.

Saya pribadi pernah merasakan sulitnya akses pendidikan di masa lalu. Baru di kelas 6 SD, saya memiliki sepatu pertama, itu pun dari karet sederhana. Sebelumnya, saya bersekolah hanya menggunakan sandal atau nyeker, sebuah fenomena biasa di masa itu. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa pendidikan dasar harus benar-benar diperhatikan sekali. Anak-anak tidak boleh kehilangan semangat belajar hanya karena keterbatasan fasilitas. Oleh sebab itu, negara harus memastikan bahwa anak-anak dapat menempuh pendidikan dengan layak, tidak terbebani dengan persoalan yang seharusnya bisa di atasi bersama.

Belajar di sekolah terdengar membosankan, karena anak hanya difokuskan pada pelajaran di kelas dan berkulat pada buku-buku pelajaran semata. Semuanya hanya terpatok pada nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum), tanpa mempertimbangkan *skill* yang relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Sistem yang hanya terfokus pada nilai dan buku pelajaran, cenderung membunuh kreativitas dan semangat belajar anak. Dampaknya, anak akan lulus dengan nilai tinggi, tetapi kurang dalam keterampilan praktis, *soft skill*, dan etos kerja. Padahal, generasi muda inilah

yang digadang-gadang akan membangun Indonesia di masa depan dan meneruskan cita-cita luhur bangsa.

Selain itu, kurikulum kita masih terlalu padat dan sering kali tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar, seharusnya belum dijelajahi dengan rumus sains yang rumit. Pada tahapan awal ini, seharusnya mereka diajarkan untuk penguasaan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta pengetahuan umum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, yang paling utama adalah penanaman pendidikan karakter untuk membentuk anak-anak yang berakhlak baik, jujur, disiplin, dan mampu bekerja sama. Jika dasar itu kuat, maka saat memasuki jenjang yang lebih tinggi, SMP dan SMA, anak-anak bisa lebih matang mendalami pengetahuan yang lebih kompleks, tetap dengan keseimbangan ilmu dan karakter.

Bahkan di perguruan tinggi sekalipun, pendidikan karakter tidak boleh diabaikan. Mahasiswa harus dididik bukan hanya untuk menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas. Mereka yang menyontek, melakukan plagiarisme, atau melanggar etika akademik harus diberi sanksi tegas. Jangan ada lagi toleransi pada hal-hal yang merusak nilai kejujuran. Begitu juga dengan kedisiplinan, datang terlambat atau membolos kelas harus dianggap pelanggaran serius. Sikap-sikap kecil inilah yang akan menjadi fondasi yang membentuk karakter besar. Bila kita tegas sejak dini, generasi Indonesia bukan hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga kuat dalam moral dan integritas.

Dalam proses mendidik anak bangsa, dibutuhkan guru-guru yang berkualitas. Namun, guru yang berkualitas tidak akan lahir bila tidak dijamin dengan penghasilan yang layak, penghargaan yang memadai, serta dukungan untuk terus berkembang. Guru bukan hanya pengajar, melainkan pendidik yang teladan. Mereka adalah sosok yang menyalakan api semangat, menumbuhkan mimpi, dan pembentukan karakter anak-anak bangsa. Sayangnya, masih banyak guru di pelosok negeri yang harus berjuang dengan keterbatasan, baik dari segi gaji, fasilitas, maupun kesempatan pelatihan. Situasi saat ini memang lebih baik dibanding masa lalu, tetapi belum cukup untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, sejahtera, dan bangga dengan profesinya.

Di sinilah pentingnya partisipasi bersama, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun pihak swasta sudah sejak lama berperan besar dalam dunia pendidikan dan tren ini harus terus diperkuat. Tugas pemerintah adalah memberikan dukungan nyata, regulasi yang tepat, serta insentif yang memadai agar semua pihak semakin bersemangat mengembangkan pendidikan. Dengan sinergi seperti ini, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari dana APBN bisa lebih tepat sasaran,

terutama untuk memperkecil kesenjangan antara sekolah-sekolah di kota besar dan daerah yang tertinggal.

Pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita tanam hari ini baru akan kita lihat hasilnya puluhan tahun ke depan. Karena itu, jika kita serius menyiapkan Indonesia Emas 2045, maka sekaranglah waktunya. Salah satu caranya sudah jelas, dengan memperkuat ekosistem pendidikan dari hulu hingga hilir. Mulai dari memperhatikan membangun sekolah layak, memperkuat pendidikan karakter, membenahi sistem kurikulum, memperhatikan kesejahteraan guru, hingga memastikan akses yang merata bagi seluruh anak bangsa.

Dengan fondasi sekuat itu, saya yakin cita-cita Indonesia menjadi negara maju bukanlah omong kosong. Kita akan memiliki generasi yang cerdas sekaligus berakhlak, didukung guru yang profesional dan sejahtera, serta sistem pendidikan yang terbuka dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Inilah modal sosial yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa besar, bermartabat, dan disegani dunia.

Pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia unggul adalah kunci yang membuka kemandirian pangan bagi Indonesia. Ini bukan sekadar impian, melainkan tujuan strategis yang bisa dicapai melalui langkah-langkah konkret. Generasi muda yang berpendidikan, tidak akan lagi memandang pertanian sebagai suatu profesi tradisional yang identik dengan keterbatasan. Sebaliknya, mereka akan melihatnya sebagai ladang inovasi dan kewirausahaan. Merekalah yang diharapkan akan mendorong transformasi sektor pertanian dari metode konvensional menjadi pertanian modern dan berkelanjutan.

Bayangkan lulusan perguruan tinggi pertanian tidak hanya menjadi peneliti, tetapi ikut terjun langsung, ke sawah, ladang, atau kebun untuk mempraktikkan dan menularkan ilmu mereka kepada para petani konvensional tentang sistem pertanian modern. Petani yang biasanya memprediksi sesuatu dengan cara konvensional dan turun-temurun, akan mendapatkan pemahaman baru tentang praktik pertanian berbasis data dan sains. Dengan demikian, pendidikan yang holistik akan menciptakan ekosistem baru, seperti petani cerdas (*smart farming*) yang mampu mengoptimalkan hasil panen, pangan berkelanjutan yang menerapkan praktik ramah lingkungan untuk menjaga kesuburan tanah dan sumber daya alam, serta nilai tambah dengan mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tinggi sebelum dijual.

Singkatnya, pendidikan akan mengubah status quo yang memutus rantai ketergantungan pangan dari luar negeri dan mulai menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri yang memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

## Di Tangan Pemimpin, Nasib Pertanian

Bila saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pesan kepada para pemimpin Indonesia hari ini maupun di masa yang akan datang, pesan saya sederhana, tetapi mendasar:

*“Jadilah pemimpin yang bersih, amanah, dan penuh dedikasi untuk bangsa.”*

Kekuasaan adalah amanah yang berat, bukan fasilitas untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Pemimpin sejati adalah mereka yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, mampu menahan godaan dan memahami bahwa setiap keputusan akan menentukan arah perjalanan bangsa.

Bangsa yang maju bukan hanya ditandai dengan angka-angka statistik yang membanggakan atau bisa disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya, tetapi juga dengan kemampuan yang menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. Jika pemimpin bekerja dengan bersih, tidak korupsi, dan bekerja sepenuh hati, maka kemajuan Indonesia tidak akan berjalan dengan tertatih-tatih, melainkan melesat jauh lebih cepat. Kesejahteraan bukan sekadar janji politik lima tahun sekali, tetapi hadir secara nyata di hadapan rakyat.

Dalam perjalanan saya sebagai pejabat publik, saya banyak belajar dan mengambil banyak pelajaran dari negara lain, meskipun tidak menirunya secara utuh. Setiap bangsa memiliki jalan sejarah sendiri. Namun, inspirasi dari bangsa lain bisa dijadikan cermin dan pengingat. Misalnya, China memberikan contoh bagaimana sebuah negara bisa tumbuh begitu cepat dalam waktu singkat dengan visi yang jelas, konsisten kebijakan, serta keberanian dalam melangkah. Selain itu ada Vietnam yang menjadi inspirasi bagi saya.

Saya sempat berkunjung ke Vietnam saat menjabat sebagai Menteri Pertanian, dan kesan saya sangatlah mendalam. Vietnam adalah bangsa yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Mereka tidak berlebihan dalam menyambut tamu, tidak sibuk dengan simbol-simbol kemewahan. Saat saya datang, saya dijamu di sebuah ruang makan sederhana, tanpa baliho besar-besaran atau seremoni yang menguras anggaran. Namun, dari kesederhanaan itu justru terpancar kesungguhan. Saya melihat sendiri bagaimana di perkotaan maupun pedesaan dengan serius membangun pertanian modern, bahkan sampai menanam anggrek yang kini menjadi komoditas ekspor terkenal di dunia. Hasilnya bisa kita saksikan hari ini.

Vietnam yang dulu sering dipandang sebagai negara yang tertinggal, kini justru menyalip Indonesia di banyak sektor. Kita ambil contoh lain, kopi. Dulu, kopi adalah salah satu komoditas kebanggaan Indonesia. Namun, untuk saat ini, Vietnam menduduki posisi terbesar kedua di dunia. Seharusnya, ini menjadi tamparan keras dan alarm untuk Indonesia: jika kita tidak berbenah, bukan tidak mungkin keunggulan di sektor-sektor yang lain akan ikut tergerus.

Selain dari Asia, ada juga negara-negara dari Eropa Utara yang meletakkan nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini begitu melekat dalam kehidupan masyarakat mereka, sehingga lahirlah sistem sosial yang disiplin, birokrasi yang bersih, dan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Sejatinya, kejujuran menjadi fondasi pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan, keadilan, dan berdaya saing tinggi.

Harapan saya adalah kita, dalam artian rakyat Indonesia, mampu memadukan semua pelajaran baik dari berbagai negara, seperti semangat kemajuan ala China, kepercayaan diri ala Vietnam, dan integritas ala Eropa Utara. Bayangkan jika ketiga hal baik itu dipraktikkan dengan sungguh-sungguh di bumi Indonesia, akan semaju apa negara kita saat itu. Ditambah dengan kepemimpinan yang bersih, amanah, dan bekerja untuk rakyat, bukan tidak mungkin Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara lain, bahkan menghadirkan kesejahteraan yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.

Karena pada akhirnya, sejarah hanya akan mengenang pemimpin yang jujur dan amanah, bukan yang berkuasa lama atau kaya raya. Pemimpin sejati adalah mereka yang menyalakan obor peradaban, bukan sekadar menikmati singgasana kekuasaan.

## **Pemerintah dan Masa Depan Pertanian Indonesia**

Apabila saya ditanya tentang harapan terbesar saya untuk Indonesia pada tahun 2045, maka saya ingin kembali menegaskan cita-cita yang sudah digarisbawahi oleh para pendiri bangsa yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Inilah janji kemerdekaan yang tidak boleh hanya menjadi tulisan di lembar konstitusi, melainkan harus diwujudkan dalam kenyataan hidup rakyat sehari-hari.

Bagi saya, makna Indonesia Emas tidak bisa dilepaskan dari kata “adil” dan “makmur”. Indonesia yang adil adalah negara yang menegakkan hukum dan peraturannya tanpa pandang bulu, memberi kesempatan kesetaraan bagi semua anak bangsa untuk maju, serta tidak membedakan rakyatnya karena status sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan Indonesia yang makmur adalah negara yang kesejahteraannya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang.

Kesejahteraan sejati berarti, tidak ada jurang yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Negara harus hadir, memastikan bahwa rakyat kecil tidak ditinggalkan. Mereka harus ditanggung dan diangkat, bukan dengan terus-menerus memberikan uang dan bantuan, tetapi dengan memberikan peluang dan kesempatan. Salah satu caranya adalah dengan mempercayakan petani lokal mengolah tanahnya sendiri. Pemerintah dapat membantu dengan memberikan sokongan bibit unggul berkualitas

dengan harga terjangkau maupun pemberian peralatan modern yang disosialisasikan secara merata, mengingatkan rakyat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani dan bergantung pada alam. Jangan biarkan dan tinggalkan rakyat kecil dalam kemiskinan dan ketidaktahuan. Rangkul mereka untuk maju bersama-sama dalam mewujudkan harapan bangsa.

Jangan sampai Indonesia disebut sebagai negara maju hanya karena angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara di saat yang sama masih ada rakyat yang menjerit dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan untuk berkarya. Selain memberikan peluang dan kesempatan untuk mengelola sumber daya alamnya, pastikan pula rakyat makan dengan layak, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan pastikan mereka tidak putus sekolah hanya karena masalah biaya. Itu bukanlah “Indonesia Emas” melainkan “Indonesia Cemas”.

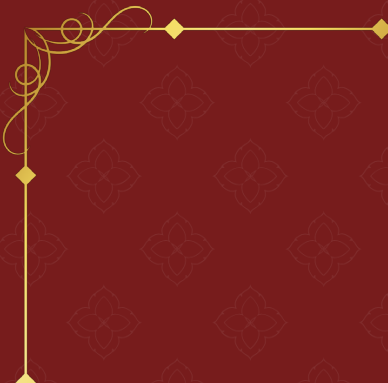
Semoga Indonesia tahun 2045 tidak hanya dikenal sebatas negara besar dengan penduduk ratusan juta jiwa dan angka ekonomi yang mengesankan, tetapi juga diakui sebagai bangsa yang adil dan sejahtera dalam praktik nyata kehidupan rakyatnya. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan di seluruh penjuru negeri. Apalah arti pembangunan infrastruktur megah, pertumbuhan ekonomi, atau pengakuan negara lain, jika rakyat kecil masih merasa tersisih dan tidak menikmati hasil pembangunan.

Keadilan juga perlu ditegakkan untuk seluruh sektor, yang paling penting adalah sektor hukum. Saat ini, kita disuguhkan cukup banyak berita yang menggambarkan hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum berat karena perut lapar, sementara para pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran, justru sering lolos dengan hukuman ringan, bahkan masih memiliki kesempatan untuk menikmati segala macam remisi dan fasilitas. Kondisi ini mencederai rasa keadilan dan membuat kepercayaan rakyat pada negara semakin terkikis habis. Di tahun 2045, semoga impian kita semua tentang sistem yang bersih, tegas, dan adil, tanpa kompromi dan diskriminasi.

Itulah harapan terbesar saya agar Indonesia benar-benar menjadi rumah bersama yang membahagiakan. Bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga bagi anak dan cucu kita di masa depan. Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekadar target angka atau slogan politik, tetapi sebuah janji moral, bahwa kemerdekaan ini harus menghadirkan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045*. BPS.
- Dillon, H. S. (2017). *Agricultural Development in Indonesia: Towards Sustainable and Inclusive Growth*. CSIS.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). *Digital Agriculture: Transforming Food and Agriculture*. FAO.
- Hill, H. (2014). *The Indonesian Economy: Prospects and Challenges*. ISEAS Publishing.
- McMichael, P. (2013). *Food Regimes and Agrarian Questions*. Fernwood Publishing.
- Neilson, J. (2020). *Global Markets, Farmers and the State: The Political Economy of Agricultural Commodities*. Routledge.
- Swaminathan, M. S. (2018). Youth and Agriculture: Key to Global Food Security. *Journal of Agriculture & Rural Development*, 19(2), 15–27.
- Tempo. (2022, November 11). *Menteri Pertanian Ajak Gen Z Menjadi Petani, Pendapatan Rp30 Juta Kalau Rajin*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-pertanian-ajak-gen-z-menjadi-petani-pendapatan-rp-30-juta-kalau-rajin-1168807>



*Makna Indonesia Emas tidak bisa dilepaskan dari kata “adil” dan “makmur”. Indonesia yang adil adalah negara yang menegakkan hukum dan peraturannya tanpa pandang bulu, memberi kesempatan kesetaraan bagi semua anak bangsa untuk maju, serta tidak membedakan rakyatnya karena status sosial, ekonomi, dan politik.*

